

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis finansial yang terjadi di Asia pada tahun 1998 yang juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada masa tersebut ditambah lagi dengan demonstrasi besar-besaran terkait dengan reformasi pemerintahan yang terjadi secara menyeluruh di setiap daerah berakhir dengan pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Penyelenggaraan negara yang menggunakan politik sentralisasi telah menimbulkan berbagai persoalan negara misalnya; ancaman disintegrasi bangsa, korupsi, demoralisasi dan budaya kepemimpinan diktator/tirani (Tori, 2011). Peralihan kekuasaan dari Orde Baru menuju Reformasi mengakibatkan banyaknya kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah yang salah satunya yakni adalah kebijakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk pemisahan hak, wewenang, dan kewajiban agar pemerintah daerah dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya tanpa adanya campur tangan secara penuh dari pemerintah pusat. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat pada setiap daerah di Indonesia. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal

dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah (Nadir, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah ini, nantinya diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi, terutama pada daerah-daerah yang tertinggal, mampu memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi di daerah. Kemudian, meningkatkan ketertiban dan keamanan wilayahnya, serta mampu memberikan kontribusi bagi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.

Otonomi daerah merupakan suatu bukti nyata dari perjuangan reformasi pada bidang pemerintahan pasca runtuhnya tirani Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun, dimana sebelumnya hanya ada 3 provinsi baru baik hasil pemekaran maupun hasil penggabungan wilayah selama kekuasaan Orde Baru berlangsung. Sementara, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hingga tahun 2012 telah terbentuk 8 provinsi baru di Indonesia hasil pemekaran daerah. Salah satu dari kedelapan provinsi baru pasca otonomi daerah yaitu Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kalimantan Timur yang saat ini statusnya resmi sebagai provinsi ke-34 dan merupakan provinsi termuda di Indonesia hingga sekarang.

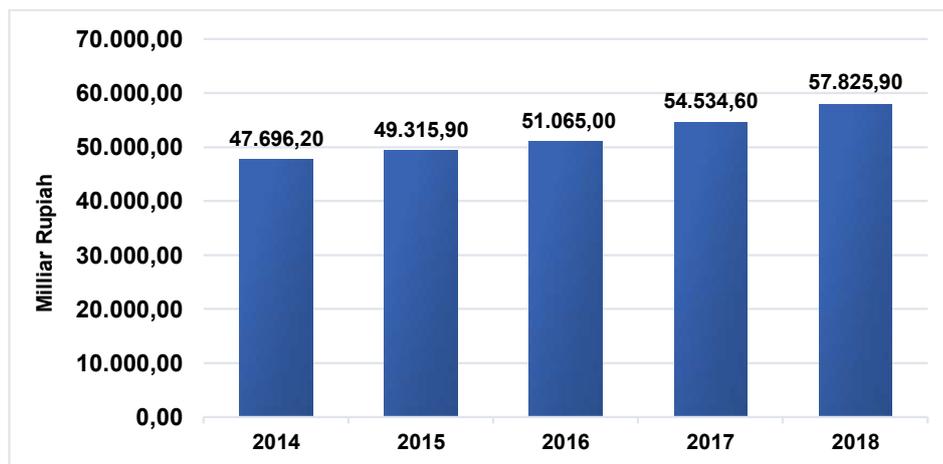
Wacana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sudah dimulai sejak awal tahun 2000 hingga baru disahkan statusnya sebagai provinsi resmi pada tahun 2012. Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012. Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara terbentuk dari bekas wilayah Kesultanan Bulungan yang dulunya pada awal kemerdekaan memiliki status sebagai daerah istimewa setingkat kabupaten, namun dihapuskan pada tahun 1964 dan menjadi Kabupaten Bulungan yang kemudian bergabung dengan kabupaten lain disekitarnya membentuk Provinsi Kalimantan Timur. Hingga pembentukannya pada tahun 2012 seluruh kawasan eks Kesultanan Bulungan ini telah mengalami pemekaran daerah sebanyak 3 kali, pada tahun 1997 pemekaran Kota Tarakan, kemudian setelah reformasi pada tahun 1999 terbentuk 2 daerah hasil pemekaran yakni Kabupaten Nunukan dan Malinau, dan terakhir tahun 2007 pemekaran Kabupaten Tana Tidung.

Sebagai provinsi termuda di Indonesia yang umurnya saat ini masih kurang dari 10 tahun, salah satu tugas penting yang dimiliki oleh pemerintah setempat yakni meningkatkan pembangunan ekonomi baik secara moneter seperti pertumbuhan ekonomi maupun non-moneter seperti kesejahteraan sosial, dari dua indikator ini maka akan diketahui bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil dalam membangun daerah otonominya sendiri. Dengan mengarahkan segala macam kegiatan pembangunan ke daerah yang relatif masih memiliki penduduk sedikit dan tingkat kesejahteraan yang cukup rendah terutama di kawasan perbatasan, maka dengan adanya pemekaran daerah di Kalimantan Utara maka bisa dilaksanakan pembangunan yang terpadu dan memiliki kesinambungan yang tentunya sesuai dengan prioritasnya.

Demi mewujudkan kesuksesan dalam pembangunan ekonomi daerah salah satu hal penting yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur yaitu besaran penerimaan dan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut penjelasan Dama dkk. (2016) bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga per tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun dasar yang dijadikan sebagai acuan. PDRB umumnya diukur melalui dua jenis pendekatan yaitu pertama pendekatan lapangan usaha yakni berdasarkan hasil dari berbagai unit produksi menurut sektor-sektor usaha, dan kedua pendekatan pengeluaran dimana dihitung berdasarkan besaran hasil yang dikeluarkan dari semua komponen permintaan akhir.

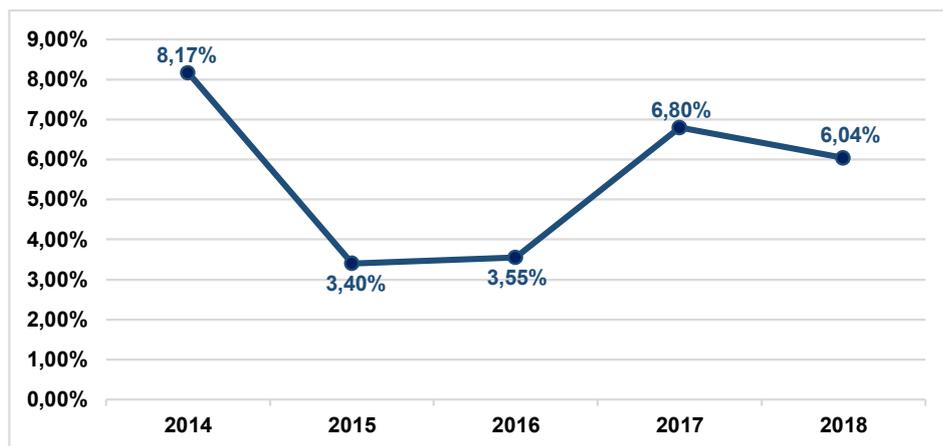
Kalimantan Utara sendiri sejak tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami peningkatan besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terhitung mulai tahun 2014 besaran PDRB Kalimantan Utara yaitu sebanyak Rp 47.696,40 miliar, setelah sebelumnya meningkat sebesar 8,17 persen dari tahun 2013. Kemudian, mengalami peningkatan lagi namun dengan persentase yang lebih kecil yakni sebesar 3,40 persen menjadi Rp 49.315,90 miliar. Pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan yang sedikit lebih besar dibanding tahun sebelumnya yakni meningkat sebesar 3,55 persen menjadi Rp 51.065 miliar. Selanjutnya, di tahun 2017

persentasenya mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 6,79 persen menjadi Rp 54.534,60 miliar dan yang terakhir meningkat 6,04 persen pada tahun 2018 menjadi Rp 57.825,90 miliar. Berikut pada Tabel 1.1 dan 1.2 merupakan rincian besaran nilai PDRB Kalimantan Utara dan laju pertumbuhannya tahun 2014-2018:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

GAMBAR 1.1
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Total
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kalimantan Utara,
2014–2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

GAMBAR 1.2
Persentase Petumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kalimantan Utara,
2014-2018

Demi mendukung dan mewujudkan suksesnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kalimantan Utara, selain indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didalamnya juga terkandung unsur-unsur berupa lapangan usaha atau sektoral yang membentuk struktur perekonomian pada PDRB, diantara banyak jenis komponen lapangan usaha tersebut tentunya terdapat beberapa sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kalimantan Utara. Berdasarkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara yang dikeluarkan tahun 2019, dapat diketahui bahwa perekonomian Kalimantan Utara sangat bervariasi. Namun, sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kalimantan Utara berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sektor ini jelas memiliki pengaruh besar terhadap PDRB, mengingat fakta di lapangan bahwa pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang sangat dominan di kawasan ini.

Selain berdasarkan pada besaran kontribusi masing-masing sektor pada Produk Domestik Regional Bruto, laju pertumbuhan juga memiliki pengaruh. Seperti yang terdapat pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum yang pertumbuhannya terus mengalami peningkatan yang signifikan (Badan Pusat Statistik, 2019). Sebab sebagai provinsi baru di Indonesia tentu sangat wajar bagi akomodasi dan makan minum yang didalamnya juga termasuk bisnis dibidang perhotelan dan restoran memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, karena wilayah baru ini dapat menjadi ladang bisnis yang menguntungkan bagi pengusaha pada bidang tersebut. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah Kalimantan Utara juga perlu memaksimalkan sektor-sektor lainnya yang belum mampu berkontribusi besar terhadap PDRB. Selain dapat

meningkatkan besaran nilai PDRB juga dengan adanya peningkatan kontribusi pada sektor minoritas maka nantinya akan tercipta pemerataan pada setiap sektor yang membentuk struktur perekonomian Kalimantan Utara.

Pembangunan ekonomi, ternyata juga sejalan dengan perspektif Islam. Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu baik yang ada di langit maupun di bumi untuk dapat dimanfaatkan. Seperti pada firman Allah berikut: QS. Al-Jaatsiyah/45:13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan Dia telah menundukkan untukku apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Seperti yang dijelaskan pada kandungan ayat diatas, hal ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan segala macam sumber daya yang telah diciptakan oleh Allah SWT agar dapat digunakan sebagaimana mestinya selama masih berada dibatas kewajaran. Penggunaan sumber daya ini juga sangat berguna bagi pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara struktural, Islam meletakkan peran sentral negara dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata dan menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan dan pemerataan serta sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi ke taraf hidup yang lebih layak (Fathurrahman, 2012).

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah selain meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor minoritas sebagai pemerataan antar

besaran hasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga harus memberikan atensi lebih terhadap beberapa sektor atau lapangan usaha yang dirasa mampu memberikan kontribusi banyak terhadap PDRB. Pemerintah Kalimantan Utara harusnya mampu mengetahui mana saja sektor-sektor yang merupakan basis dan non basis serta dapat melakukan pemetaan sesuai dengan kuadrannya masing-masing. Dari pengelompokan sektor-sektor atau lapangan usaha tersebut maka akan terbentuk pola atau struktur perekonomian daerah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun perekonomian Kalimantan Utara. Hal ini juga harus diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia serta juga diperlukannya perencanaan jangka panjang untuk keberhasilan dan kesuksesan pemerintah setempat dalam meningkatkan kesejahteraan baik secara sosial maupun pembangunan ekonomi pada masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan pada permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia, disini penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan tema yang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang membentuk struktur pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Maka dari itu judul yang diambil pada tema penelitian ini adalah: **“Analisis Potensi Ekonomi dan Strategi Pembangunan Daerah Berbasis Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Utara.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang terjadi, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja yang termasuk dalam sektor basis dan non basis pada perekonomian Provinsi Kalimantan Utara?
2. Berapa besar laju pertumbuhan PDRB dari masing-masing sektor perekonomian Provinsi Kalimantan Utara?
3. Bagaimana karakteristik pertumbuhan dan kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian Provinsi Kalimantan Utara?
4. Bagaimana rasio pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara dengan PDB Nasional dari masing-masing sektor?
5. Bagaimana potensi daerah Kalimantan Utara berdasarkan pada hasil perbandingan beberapa metode analisis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui mana saja yang termasuk dalam sektor basis dan non basis pada perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mengetahui laju pertumbuhan PDRB dari masing-masing sektor perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.
3. Mengetahui karakteristik pertumbuhan dan kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.
4. Mengetahui rasio pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara dengan PDB Nasional dari masing-masing sektor.

5. Mengetahui potensi daerah Kalimantan Utara berdasarkan pada hasil perbandingan beberapa metode analisis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini kedepannya penulis berharap dapat berguna dan bermafaat bagi:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dimana dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan pembangunan ekonomi berdasarkan pada sektor-sektor yang memberi kontribusi besar terhadap PDRB.
2. Masyarakat Kalimantan Utara, yang mana nantinya bisa menjadi referensi bagi masyarakat di daerah dalam menentukan mana saja sektor yang kiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memulai usaha.
3. Peneliti Selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini nanti dapat berguna bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama mengenai struktur perekonomian daerah sektor unggulan.